

## BAB IV

### RESPON LESBUMI (NU) TERHADAP GERAKAN LEKRA (PKI)

#### A. Gejolak polemik kebudayaan dan kesenian tahun 1950-1965

Dalam sejarah Kebudayaan Indonesia Modern, ada relasi yang sangat erat antara seni budaya dan politik.<sup>99</sup> Pada masa Orde Baru menunjukkan peristiwa yang terjadi menjelang awal Orde Baru yang berkuasa yakni ditulis tidak berimbang dan tidak tuntas dengan potensi kontroversi yang tinggi. Setiap kali diterbitkan hasil penelitian atau buku yang membicarakan apa saja dengan latar tahun 1960-an selalu memicu perdebatan, baik dari sudut fakta maupun interpretasi terhadapnya.<sup>100</sup>

Demikian pula yang terjadi di wilayah kebudayaan. Apa yang terjadi di paruh pertama 1960-an, masih terus diperdebatkan dari tahun ke tahun, dengan kualitas isi perdebatan yang tidak pernah mengalami peningkatan. Artinya masih dalam level saling tuding tentang apa saja yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan pada masa itu. Masing-masing pihak mempertahankan pengalaman dan pengetahuannya sebagai iman dan

---

<sup>99</sup> Choiratun Chisaan, *Lesbumi Strategi Politik Kebudayaan*, (Yogyakarta : LKIS 2008), hlm. 2

<sup>100</sup> Alexander Supartono, *Lekra vs Menikebu Perdebatan Kebudayaan Indonesia tahun 1950-1960* dijelaskan bahwa penulisan sejarah orde baru, terutama pada masa-masa tahun 1960-an, di mana sejarah adalah sebuah interpretasi tunggal. Karena penjelasan yang ada tentangnya hanya datang dari satu sisi, yaitu dari mereka yang bersama Orde Baru keluar sebagai pemenang. Konsekwensi selanjutnya adalah segala informasi, interpretasi dan pendapat dari pihak yang kalah jadi tertutup. Sejarah ditulis oleh para pemenangnya, hlm, 7.

dengan demikian menutup pintu diskusi.<sup>101</sup> Tinggallah semacam “pengetahuan umum” yang tidak tuntas: bahwa pada paruh pertama 1960-an telah terjadi perdebatan sengit di wilayah kebudayaan Indonesia.<sup>102</sup>

Antara di satu pihak sekelompok seniman dan cendekiawan yang bergabung dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), yang sangat dekat dengan Partai Komunis Indonesia dengan “ideologi” Realisme Sosialis dengan semboyan politik sebagai panglima.<sup>103</sup> Pihak lawannya adalah kelompok non partisan Manifes Kebudayaan yang menolak politik sebagai panglima di bidang seni dan memilih seni untuk seni dengan “ideologi” Humanisme Universal. Di sana sini muncul peserta debat lain, yang masing-

---

<sup>101</sup> Martin Van Bruinessen, *Traditionalist Muslims in A Modernizing World : The Nahdlatul Ulama and Indonesia's New Order Politics, Fitional Conflict, and The Search for a New Discourse* diterjemahkan oleh Farid Wajidi, *NU Tradisi, Relasi Kuasa, Pencarian Wacana baru*, (Yogyakarta : LKIS, 1994), hlm. 90-91

<sup>102</sup> Alexander Supartono, *Lekra vs Menikebu*, hlm. 8

<sup>103</sup> Politik adalah panglima merupakan semboyan pegangan, agar sebelum melakukan penggarapan seni, orang harus mengkajinya dari jurusan politik. kesalahan politik jauh lebih sesat daripada lesalahan artistik. politik harus jadi obor. Njoto dihadapan Kongres Nasional Lekra mengatakan bahwa: ”Politik itu penting sekali. jika kita menghindarinya, kita akan digilas mati olehnya. Oleh sebab itu, dalah hal apa pun dan kapan pun, politik harus menuntut segala kehidupan kita. Dalam pengabdian sastra dan seni untuk rakyatnya, yang dimaksudkan dengan Politik adalah politik kelas, politik masa, bukannya politik dari segelintir orang yang disebut negarawan. Politik, apakah ia politik revolusioner atau kontrarevolusioner dalah perjuangan kelas melawan kelas, bukan dari segelintir individu-individu. Dalam mengusung pola dalam menghasilkan karya, tak dapat dipungkiri bahwa kecenderungan mereka (para seniman Lekra) harus berkarya yang tidak hanya bertujuan berkesenian bahwa, ”seni hanya untuk seni” itu sendiri saja, tetapi mereka mempunyai misi dan tujuan, dalam karya selalu mengutamakan bahwa seni itu, merupakan suatu implementasi nyata, dan suatu alat untuk mengobarkan politik bernegara yang kerakyatan, sehingga karya seni tersebut diharapkan mampu memperjuangkan realitas seni

kerakyatan (membela rakyat) dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, yang pada saat itu banyak rakyat kecil yang tertindas. Mereka (seniman Lekra) banyak melahirkan karya yang mengusung tema-tema sosial masyarakat dan pembelaan atas ketertindasan rakyat kecil.

masing condong ke salah satu kubu seperti Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN/PNI) atau Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi/NU) Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI/Masyumi), Lembaga Kebudayaan Indonesia Katolik (Lesbi/Partindo), Lembaga Kebudayaan dan Seni Islam (Lekri/Perti). Hasil studi dan tulisan yang telah ada pun tidak memunculkan suatu polemik atau perdebatan baru yang lebih berkualitas dan bisa memunculkan kehendak atau usaha untuk melihat permasalahannya lebih rinci.<sup>104</sup>

Salah satunya merupakan sejarah awal pertumbuhan sastrawan-sastrawan Indonesia menunjukkan perhatian yang serius kepada politik. Bahkan ada di antaranya yang kemudian lebih terkenal sebagai politikus daripada pengarang seperti Muh. Yamin dan Roestam Effendi. Demikian juga para pengarang pujangga baru ialah orang-orang yang aktif dalam dunia pergerakan nasional. Para pengarang pada awal revolusi bukanlah orang-orang yang bersifat a-politis. Pramaedya Ananta Toer, Achdiat K. Mihadja, Mochtar Lubis merupakan orang-orang yang mempunyai pandangan dan kesadaran politik.<sup>105</sup>

Perbedaan-perbedaan pandangan mengenai seni dan sastra yang berpangkal pada perbedaan-perbedaan pendirian politik, sudah sejak lama

---

<sup>104</sup> Choerotun Chisaan, *Lesbumi Strategi Politik dan Kebudayaan*, hlm, 2-3

<sup>105</sup> Ajib Rosidi, *Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia*, (Bandung : Bina Cipta, 1968), hlm.

kelihatan dalam dunia sastra Indonesia.<sup>106</sup> Pada awal tahun lima puluhan terjadi polemik yang seru juga antara orang-orang yang membela hak hidup Angkatan 45 dengan orang-orang yang mengatakan “Angkatan 45 sudah mampus” yang berpangkal pada suatu sikap politik. Pihak yang berpaham realisme-sosialis, yaitu paham yang menjadi filsafat-seni kaum komunis aktif mengadakan polemik.<sup>107</sup>

Penganut paham realisme sosial yang paling keras teriakannya ialah As Dharta yang menjadi pokok soal bahan polemik-polemik ialah paham “seni untuk seni” dan “seni untuk rakyat”, orang-orang yang menganut paham realisme sosialis berpaham “seni untuk rakyat” sambil mengutuk orang-orang yang berpaham “seni untuk seni” sebagai penganut “humanisme universal” yang dicapnya sebagai filsafat kaum borjuis kapitalis yang bobrok.<sup>108</sup>

Ketika dalam pembentukan Lekra terdapat orang-orang yang kemudian menjadi musuh antara lain HB Jassin dan Achdiat K. Mihadja. Setelah PKI kuat kedudukannya, Lekra secara resmi menjadi organ

---

<sup>106</sup> Dalam testimoni M. Misbach Yusa Biran dikatakan bahwa Munculnya polemik kebudayaan sudah muncul dan hangat-hangatnya pada tahun 1930-an .

<sup>107</sup> Ibid..163

<sup>108</sup> A.S Dharta salah satu tokoh yang lantang dalam paham realisme sosialis yang sering mempergunakan nama samaran Yoga Swara, Klara Akustia, dan lain-lain. Di pihak lain berdiri H.B Jassin dan kawan-kawanya. Sementara itu polemik semacam itu terjadi pula di Medan, antar Bakri Siregar yang menganut paham realisme-sosialis di satu pihak dengan Aoh K. Hadimadja (yang ketika itu berada di Medan) pada pihak yang lain. Sekitar tahun 1952 terjadi pula polemik semacam itu antara Joebar Ajoeb yang menganut paham realisme-sosialis dengan Harijadi S. Hartowardojo di pihak lain dalam ruang Gelanggang/siasat.

kebudayaannya. Lekra dengan tegas menganut “seni untuk rakyat” dan menghantam golongan yang menganut paham “seni untuk seni”. Dalam gelanggang percaturan politik PKI makin kuat kedudukannya. Tahun 1959 Soekarno mendekritkan UUD 1945 berlaku lagi dan mengajukan “Manifesto Politik” (Manipol) sebagai dasar haluan negara. Manipol memberikan ruang gerak kepada PKI untuk merebut tempat-tempat dan posisi-posisi penting untuk merebut kekuasaan. Apalagi ketika ajaran Nasakom (Nasionalis, Agama dan komunis) dijadikan pola perbandingan kekuatan dalam lembaga-lembaga resmi dan tidak resmi.<sup>109</sup>

Sejak Kongresnya tahun 1957, PKI sudah bertekad untuk aktif menguasai bidang seni budaya dengan segala macam cara PKI mengerahkan segala kekuatan dalam segala bidang. Antara lain dengan menghancurkan tonggak-tonggak bidang kesenian di fihak lawan, seperti meruntuhkan H.B Jassin, menuduh Hamka sebagai plagiat dan Dalam bidang sastra satu persatu pengarang yang mempunyai paham berbeda dengan mereka, dihantam dan dimusnahkan. Sutan Takdir Alisjahbana yang

---

<sup>109</sup> Diterbitkan oleh Sekretariat Negara RI tentang Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia mengenai latar belakang , aksi dan penumpasannya, (Jakarta : Mensesneg 1994), hlm. 29

politis menjadi anggota partai yang dibubarkan (PSI) dan Buku-buku mereka dituntut supaya dilarang dipergunakan.<sup>110</sup>

Kemudian terang-terangan ingin menguasai masyarakat perfilman, dan lain-lain. Dengan semakin kuatnya posisi PKI di sekitar Soekarno sejak 1960 yakni karena PKI mendukung kebijakan Soekarno untuk mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 maka perjuangan Lekra semakin hebat. Semua musuh komunis dibabat habis. NU yang turut mendukung Soekarno, juga memiliki kekuatan besar.

Tahun 1950 PNI membentuk Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) diketuai oleh Sita Situmorang. NU membentuk Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (LESBUMI) dengan ketua Osman Ismail. Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Syariat Islam Indonesia (PSII), Partai Indonesia (Partindo). Berbeda dengan Lekra yang dilekati garis aliran realisme sosialis atau kubu manifes kebudayaan yang dilekati garis aliran humanisme universal, Lesbumi yang berafiliasi menampik kedua garis aliran itu. Lesbumi menolak jargon “politik adalah panglima” yang menjadi

---

<sup>110</sup> Ungkapan yang dipaparkan oleh H. M Yusa Biran dalam testimoni buku *Lesbumi Strategi Politik Kebudayaan*, Choitotun Chisaan, bahwasanya dia bergabung dengan Lesbumi bukan karena jabatan, honorium tapi karena Lillahi ta’ala, demi Islam untuk menentang komunis yang anti tuhan. Dan saya ikut saat gencar-gencarnya perjuangan, alhamdulillah semua golongan Islam melupakan batas antara golongan dan partai. Semua bergabung melawan Lekra. Lesbumi menjadi ujung tombaknya.

motor penggerak aktivitas Lekra, dan semboyan “seni untuk seni” (I’art pour I’art) yang menjadi ‘elan vital Manifes Kebudayaan.

Karakter utama yang membedakan Lesbumi dari Lekra dan Manifes Kebudayaan adalah kentalnya warna “religius” dalam produksi seni budayanya. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari dua titik ini, Lesbumi sebenarnya mencoba memberikan alternatif baru dalam berkesenian dengan memberikan tempat bagi unsur keagamaan (Islam) setara dengan kebudayaan melalui sebuah kontestasi seni budaya ketimbang sebuah pertarungan politik. Sikap tengah-tengah (Moderat) nampaknya coba ditempuh oleh Lesbumi senada dengan garis idiologi Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja) yang menjadi landasan politik keagamaan NU, organisasi induknya.

Pada masa-masa itu kebiadaban PKI memaksa para seni dan satrawan untuk menerima jargon<sup>111</sup> “politik sebagai panglima” sastra menjadi tempat berkumpul orang-orang yang hendak mempertahankan otonomi seni dalam kehidupan pada tanggal 17 Agustus 1963 diumumkanlah ‘Manifes Kebudayaan’<sup>112</sup> yang disusun dan ditandatangani

---

<sup>111</sup> Jargon Kosakata khusus yang dipergunakan di bidang kehidupan (Lingkungan) tertentu, lihat dalam G/30/S/PKI yang diterbitkan Mensesneg, Glosari hlm. 67

<sup>112</sup> Adalah pernyataan pendirian para seniman dan cendekiawan Indonesia tentang cita-cita dan politik kebudayaan nasional dengan pancasila sebagai falsafah kebudayaan mereka. Manifes ditandatangani oleh 20 seniman, dikeluarkan pada tanggal 17 Agustus 1963. Manifes Kebudayaan oleh PKI disingkat Manikebu. Atas saran PKI organisasi ini dilarang oleh Presiden pada tanggal 8 Mei 1964

oleh sejumlah pengarang dan pelukis H.B Jassin, trisno Sumardjo, wiratmo Soekito, Zaini, Goenawan Mohammad, bokor Hutasulut, Soe Hok Djin dan lain-lain sebanyak 20 seniman yang isinya:

### **Manifes Kebudayaan**

- ❖ Kami para seniman dan cendekiawan Indonesia dengan mengumumkan sebuah manifes kebudayaan yang menyatakan pendirian, cita-cita dan politik kebudayaan nasional kami.
- ❖ Bagi kami kebudayaan adalah perjuangan untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia. Kami tidak mengutamakan salah satu sektoral kebudayaan di atas sektor kebudayaan lain. Setiap sektor berjuang bersama-sama untuk kebudayaan itu sesuai dengan kodratnya.
- ❖ Dalam melaksanakan kebudayaan nasional kami berusaha mencipta dengan kesungguhan yang sejujur-jujurnya sebagai perjuangan untuk mempertahankan dan mengembangkan martabat diri kami sebagai bangsa Indonesia ditengah-tengahnya masyarakat bangsa-bangsa.
- ❖ PANCASILA adalah falsafah kebudayaan kami.

Jakarta, 17 Agustus 1963

Soekarno yang ketika itu menjadi Presiden dan kedekatannya dengan PKI mengaskan terlarangnya Manifes Kebudayaan, padahal kala itu diumumkananya Manifes ini membawa harapan besar bagi seniman, sastrawan dan cendekiawan di seluruh plosok tanah air sebagai penyelamat dikarenakan teror dan hujatan yang dialukan oleh Lekra/PKI.<sup>113</sup> Namun berbeda dengan tanggapan Lekra munculnya Manifes ini lebih

---

<sup>113</sup> M.C Riklefs, *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2008*, (Jakarta : IKAPI Serambi Ilmu Semesta, 2008), hlm. 570



memudahkan untuk menumpas habis yang mereka anggap musuh. Manifes Kebudayaan menjadi sasaran utama kebringasan Lekra, ketika itu surat kabar, majalah, juga media radio hampir dikuasai seluruhnya. Para seniman, pengarang dan budayawan dihantam yang tidak sepaham dan diusir dari setiap kegiatan, ditutup segala kemungkinan mengumumkan karya-karyannya, bahkan yang menjadi pegawai pemerintah dipecat dari pekerjaannya.<sup>114</sup>

## **B. Respon NU Lesbumi terhadap PKI Lekra**

Dari peristiwa yang disebut penghianatan Parati komunis Indonesia yang lebih dikenal dengan sebutan G30S PKI/Gestapu/atauGestok.<sup>115</sup> Semua elemen masyarakat menuntut untuk dibubarkannya partai ini sampai ke akar-akarnya dan antek-anteknya dari bumi pertiwi Indonesia.

---

<sup>114</sup> Ajib Rosidi, *Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia*, hlm. 168

<sup>115</sup> Beberapa istilah untuk menyebut peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 itu. Pemerintah menggunakan istilah G.30.S, kemudian mereka menambahkan PKI dibelakangnya. Istilah G.30.S/PKI lebih merupakan sebuah stigma buruk untuk menyudutkan bahwa PKI yang menjadi dalang peristiwa itu, hal ini sangat lazim digunakan pada masa Orba. Selain G.30.S/PKI, juga digunakan istilah Gestapu 1965, kepanjangan dari Gerakan September 30. Istilah Gestok atau Gerakan Satu Oktober dikemukakan oleh Presiden Soekarno. Ia mengajukan argumen bahwa penculikan itu terjadi pada tanggal 1 Oktober dini hari. Jadi, tidak tepat jika dikatakan sebagai Gerakan 30 September. Dalam penulisan ini akan digunakan istilah Gestapu, merujuk pada pengumuman Letkol. Untung Syamsuri di RRI yang menyebut gerakannya sebagai Gerakan 30 September

Dalam sebuah artikel Harian Bersenjata tahun 1 November 1965 yakni memuat kisah mengenai seorang laki-laki, anggota dari SOBSI yang menyembunyikan latihan-latihan militer di Lubang Buaya untuk persiapan G30S. Latihan ini diikuti oleh PKI dan ormas-ormasnya. Disebutkan juga PKI sebagai anti Pancasila hanya alat pemersatu dan penghianatan agama. Pada tanggal 2 November 1965, Brigjen Surjosumpeno menyatakan bahwa Gestapu harus dilenyapkan, semua oknum, ormas, dan parpol harus ditumpas, serta peristiwa G30S adalah masalah nasional, bukan masalah internal AD.

Sebelumnya itu telah dikeluarkan penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 tentang syarat-syarat dan penyerdehanaan kepartaian, ditetapkan bahwa setiap partai politik harus berasaskan pancasila. Untuk itu, beberapa kali pimpinan PKI, D.N. Aidit, dipanggil oleh panitia tiga menteri (Menteri keamanan nasional, Jendral TNI A.H. Nasution), (Menteri dalam negeri dan otonomi daerah Ipi Gandamana), dan (menteri wakil ketua DPA, Dr. H Roeslan Abdulgani) untuk dimintai penjelasannya.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> Kacung Marijan, *Quo Vadis NU setelah kembali ke Khittah 1926*, (Erlangga : Jakarta, 1992), hlm. Dalm keputusan tersebut sebagian besar partai dipaksa membubarkan diri, sehingga tinggal 10 partai saja. Masyumi dan PSI yang sejak semula getol menolak Konsepsi Demokrasi terpimpin, termasuk partai yang dipaksa bubar. Dan hanya ada 10 Partai.

Dari hasil penilaian panitia tiga menteri, disimpulkan bahwa PKI mempunyai tujuan lain, baik secara politis maupun secara ideologis. Masalah ini kemudian dilaporkan kepada Presiden Soekarno tentang ancaman bahaya PKI terhadap bangsa Indonesia. Dengan telah dilakukannya penyesuaian pada anggaran dasar PKI dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Penpres Nomor 7 tahun 1959, Presiden Soekarno menilai bahwa kehadiran PKI dapat dikendalikan. Oleh karena itu berdasarkan keputusan Presiden Nomor 128/1961, bersama dengan tujuh partai lainnya (PNI, NU, Partai Katolik, Partindo, Partai Murba, PSII dan IPK), PKI diakui sebagai partai yang sah.<sup>117</sup>

Sekedar untuk menegakkan eksistensinya, mula-mula PKI menyatakan menerima UUD 1945 dan Pancasila. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, PKI mencoba menampilkan interpretasinya sendiri tentang Pancasila dengan mengatakan bahwa Pancasila hanyalah sekedar pemersatu. Dalam kongres VII bulan April 1962, M.H. Lukman mengatakan bahwa Pancasila adalah falsafah persatuan. Tokoh lainya Njoto mengatakan bahwa Pancasila adalah alat pemersatu. Tema Pancasila sebagai alat pemersatu dikampanyekan D.N Aidit di kalangan ABRI terutama perwira-perwira yang sedang mengikuti pendidikan di

---

<sup>117</sup> Sekretarian Negara Republik Indonesia, Gerakan 30 September Pemberontakan PKI, hlm . 32

tingkat Sekolah Staf dan Komando. Yang kemudian sering dikenal dengan “Heboh Pancasila” Pernyataan Aidit :”.....dan disinilah betulnya Pancasila sebagai alat pemersatu. Sebab kalau sudah satu semua....Pancasila ndk perlu lagi sebab Pancasila alat pemersatu. Dibagian lain:”...Landasan idiil Pancasila yang lahir pada tahun 1945 adalah Nasakom, dan Pancasila merupakan falsafah persatuan dari Nasion Indoensia.<sup>118</sup>

Sikap NU Dalam keputusan di atas mengenai penyerdehanaan, partai NU mendukung dan turut dalam DPRGR. Beberapa tokoh NU sebenarnya menolak keputusan ini. Tetapi K.H. Wahab Hasbullah menerimanya. Dan karena ia amat berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan di NU, secara organisatoris NU memutuskan turut dalam DPRGR. Adapun alasan yang dipakai adalah sebagai berikut.

Kita putuskan sekarang ini saja karena waktunya sangat mendesak. Menunggu berlangsungnya musyawarah wilayah bisa ketinggalan kereta api. Kita putuskan sekarang saja, kita masuk dulu dalam DPRGR, setelah itu kita minta penegasan musyawarah antar wilayah. Kalau musyawarah antar wilayah memutuskan kita harus masuk, kita sudah berada di dalam. Tetapi jika musyawarah memutuskan menolak DPRGR, apa sulitnya kita keluar dari DPRGR.

---

<sup>118</sup> Ibid..32-33

Akan tetapi kalau sekarang ini kita menolak duduk dalam DPRGR, lalu musyawarah antar wilayah memutuskan kita harus masuk dalam DPRGR, kita sudah terlambat, pintu masuk sudah tertutup.<sup>119</sup>

Logika seperti ini menunjukkan bahwa selain didasarkan pada nilai-nilai keagamaan yang dianut, NU berupaya memanfaatkan kesempatan yang ada untuk kepentingan-kepentingannya. Apalagi ketika NU menjadi kekuatan politik besar setelah bubar dari Masyumi bubar pada 1960.<sup>120</sup> Demokrasi terpimpin tidak berentangan dengan agama Islam. Meskipun ada orang NU yang menentangnya seperti Imron Rosyadi dll. Itulah NU yang sejak dulu mengawal jalanya pemerintahan Indonesia dari mulai berdirinya-Zaman Belanda-Zaman Jepang-Kemerdekaan-Pasca Kemerdekaan-sampai revolusi dengan meletusnya 30 September 1965.

Balik lagi dalam pembahasan Gestapu, setelah pemberontakan ini meletus banyak kecaman, pemberantasan terhadap G30S. Mulai masyarakat, aparat, ormas-ormas di seluruh penjuru kota, dan bahkan juga anak-anak kecil. kemudian menunjukkan secara tegas bahwa PKI adalah dalang dari G30S. Simak saja pernyataan ini diambil dari :

---

<sup>119</sup> Kacung Marijan, *Quo Vadis Nu, Setelah kembali ke Khittah 1926*, hlm.86

<sup>120</sup> Ibid..86-87 Dulu NU diejek dan dicemoohkan oleh golongan tertentu sebagai partai bakiak dan tahlil, tetapi sekarang ternyata NU menjadi besar dan akan tetap tambah besar untuk memimpin umat Islam bukan saja di negara Indonesia, tetapi juga imamnya umat Islam di seluruh dunia.

“Pengakuan-pengakuan para tahanan serta dokumen yang telah dapat disita oleh pihak yang berwajib telah menguatkan pembuktian bahwa PKI betul-betul terlibat dan mendalangi gerombolan kontra revolusi G30S...”<sup>121</sup>

Untuk mencapai semua tujuannya, PKI bergerak sekuat tenaga dalam mencapai Indonesia dengan ideologi Marxisme-Komunisme dengan menggerakkan ormas-ormas PKI antara lain, pemuda Rakyat (PR), Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI), Barisan Tani Indonesia (BTI), Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (Perhimi), Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI), Lembaga kebudayaan Rakyat (Lekra), Himpunan Sarjana Indonesia (HIS), Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), dan Barisan Nelayan Indonesia (BNI).<sup>122</sup>

Tidak itu saja kedekatannya dengan Presiden Soekarno menjadikan PKI bergerak dalam tubuh pemerintahan. Dalam mencapai tujuan partai, pimpinan PKI membentuk Biro Khusus Sebuah yang mengendalikan PKI di Indonesia. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan partainya, baik secara terbuka

---

<sup>121</sup> Diakses pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 dalam situs : <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/128898-T%2026659-Penyebaran%20hateAnalisis.pdf>

<sup>122</sup> Mayjen (Purn) Syamsudin, *Mengapa G30S/PKI gagal*, (IKAPI : Jakarta 2004), hlm. 30

maupun melalui kegiatan di bawah tanah, yaitu menciptakan keresahan di dalam masyarakat, sebagai langkah persiapan untuk merebut kekuasaan ke dalam tanganya.<sup>123</sup>

Dalam perkembangannya, ternyata PKI telah mempersiapkan berbagai gerakan dan melontarkan berbagai isu untuk menciptakan situasi yang membuka jalan bagi mereka untuk merebut kekuasaan.

1. Sabotase, Aksi sepihak dan aksi teror :
2. Sabotase terhadap Transportasi Umum Kereta Api oleh Sarekat Buruh Kereta Api
3. Aksi-Aksi Sepihak BTI (Barisan Tani Indonesia)
4. Aksi-Aksi teror
5. Agitasi Propaganda
6. Aksi fitnah Terhadap Pimpinan TNI-AD

Sejak tanggal 6 September 1965 gerakan telah dimulai, di mana pimpinan Biro Khusus PKI berturut-turut mengadakan rapat rahasia dengan beberapa oknum ABRI yang telah dibina untuk membicarakan persiapan melaksanakan gerakan.

Dalam suatu rapat ditetapkan tentang penentuan sasaran gerakan bagi masing-masing pasukan. Pasukan-pasukan itu dipersiapkan untuk

---

<sup>123</sup> Dalam buku yang berjudul Suksesi Pergantian Presiden Tahun 1966 yang diterbitkan oleh ANRI proyek pemasyarakatan dan diseminasi kearsipan nasional jakarta tahun 2004, dijelaskan tentang semua penolakan-penolakan terhadap PKI, hlm 1-3

menculik para jenderal sebagai upaya dalam mencapai tujuannya. Tepat tengah malam 1 Oktober 1965 gerakan tersebut mulai merambah ke tempat yang telah mereka sepakati sebelumnya. Pada malam itu, telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang ditujukan kepada Letjen Ahmad Yani, Mayjen R. Suprpto, Mayjen S Parman, Mayjen M.T. Haryono, Brigjen D.I Panjaitan, Brigjen Sutopo Siswonihardjo. Sementara Jenderal A.H. Nasution selamat, tetapi putrinya Ade Irma Suryani tewas tertembak. Demikian juga dengan ajudanya, Letnan Satu Piere Tendean diculik kemudian dibunuh.<sup>124</sup>

Tak dapat dipungkiri bahwa PKI pada masa itu adalah partai besar yang menguasai dunia politik Indonesia. Beberapa anggotanya bahkan menempati pos-pos penting dalam pemerintahan, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR). Njoto adalah salah satu dari anggota PKI yang juga terlibat dalam pendirian Lekra terkena imbas pemecatan sebagai anggota DPRGR. Namu sekali lagi PKI telah memperkosa nama Tuhan dan agama.

Mayjen Soeharto, dalam menghadapi G30S, mengatakan untuk mengerahkan kekuatan secara simultan. Bukan itu saja, Soeharto juga mencetuskan untuk melakukan pemencilan, baik secara fisik dan

---

<sup>124</sup> Ibid..2



mental, terhadap oknum-oknum yang terlibat G30S. PKI dan ormas-ormasnya menguasai politik Indonesia juga dilancarkan di bidang seni dan budaya. Lagu Genjer-genjer hasil gubahan Muhammad Arief, komponis Lekra yang diidentikkan dengan lagu PKI juga dikatakan menjadi lagu yang banyak dinyanyikan pada saat sebelum eksekusi di Lubang Buaya.<sup>125</sup>

Lekra, telah menyediakan kantor di daerah Tebet, Jakarta Selatan sebagai tempat persiapan pelaksanaan G30S. Para anggota PKI, PR, dan Gerwani yang berjumlah sekitar 50 orang berkumpul di kantor Lekra untuk menerima arahan dan senjata. PNI bahkan menyatakan memiliki bukti bahwa PKI dan ormas-ormasnya sebagai biang keladi G30S. Dalam hal itu bahwa rakyat sudah *emoh* terhadap PKI dan ormas-ormasnya. Hal ini disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat, seperti

---

<sup>125</sup> Asvi Warman Adam, *Menguak Misteri Sejarah*, (Jakarta : PT Kompas, 2010), hlm. 238 dijelaskan bahwa “Lagu Genjer-genjer diciptakan oleh Muhammad Arief, komponis yang tergabung dalam Lekra, yang berasal dari Banyuwangi pada tahun 1960-an. Arief membuat lagu ini berdasarkan penderitaan rakyat yang dijajah Jepang pada masa itu. Kebanyakan kaum laki-laki diambil pergi, sedangkan hasil bumi Banyuwangi yang limpah ruah dirampas oleh Jepang. Akhirnya, rakyat, demi memenuhi asupan pangan, mengambil dan memunguti tanaman genjer dari sawah untuk dikonsumsi. Padahal tanaman genjer yang banyak tumbuh di sawah ini sebelumnya dianggap sebagai tanaman pengganggu. Tahun 1962, Njoto, seniman Lekra yang juga anggota PKI ini datang ke Banyuwangi dan senang ketika mendengar lagu ini. Oleh Njoto, lagu ini dibawa ke ibukota untuk disebarluaskan di TVRI. Lilis Suryani dan Bing Slamet adalah artis terkenal yang kemudian menyanyikannya. Lagu ini kemudian menjadi hits dan dianggap sebagai lagu nasional, karena menunjukkan potret rakyat yang menderita, namun tetap bersemangat hidup. Setelah G30S meletus, Arief sendiri mati dibunuh oleh gerakan anti PKI pada tahun 1966-1967.

Ketua NU, K.H. Ahmad, dan Ketua PNI, Ali Sastroamidjojo, SH. Mereka secara tegas menolak kemungkinan lahirnya neo-PKI.<sup>126</sup>

Al-Ahram menyatakan bahwa peristiwa Gestapu/PKI adalah sikap yang menomorsatukan kepentingan partai dan menomorduakan kepentingan nasional. Aksi PKI dan ormas-ormasnya ini, masih kata Al-Ahram, telah mendorong lahirnya reaksi kuat dari rakyat Indonesia. Hal ini terbukti dari adanya pembakaran gedung PKI oleh para demonstran.<sup>127</sup> Soeharto menandakan bahwa Gestapu adalah peristiwa yang didalangi oleh PKI, dan PKI telah melakukan tiga kejahatan sekaligus: kejahatan kriminal, kejahatan politik, dan kejahatan terhadap moral Pancasila. Pelarangan terhadap PKI dan ormas-ormasnya ini kemudian disahkan dalam aturan yang bernama Tap MPRS No. XXV pada tahun 1966. Tap ini juga mencantumkan pelarangan penyebaran ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme.<sup>128</sup>

Peristiwa G30S tidaklah didalangi PKI semata. Ormas-ormas *underbouwnya* juga turut terlibat. PNI mengatakan bahwa ia mendapatkan fakta peristiwa G30S dilakukan oleh PKI dan ormas-

---

<sup>126</sup> Gloria Truly Estrelita, Tesis *Penyebaran hite Crime Oleh Negra terhadap Lembaga kebudayaan rakyat (Lekra)*, (Universita Indonesia fakultas Ilmu Sosial dan Politik Departemen kriminalogi, Jakarta : 2009), hlm.27

<sup>127</sup> Gloria Truly Estrelika,...30

<sup>128</sup> J.F Tualaka, *Buku Pintar Politik, Sejarah, Pemerintah dan Ketetanegaraan*, (Yogyakarta : Great Publisher, 2009), hlm. 56.

ormasnya. Salah satunya adalah Lekra yang menyimpan dokumen-dokumen penting berkaitan dengan peristiwa tersebut di gudangnya yang terletak di jalan Cidurian, Jakarta Pusat.<sup>129</sup>

Tujuh partai politik, yaitu PSII, Partai Katolik, Parkindo, IPKI, PERTI, NU, PNI ditambah dengan Golongan Karya dan Muhammadiyah lalu mengajukan tuntutan agar PKI dan ormas-ormasnya dinyatakan terlarang. Tuntutan ini didukung juga oleh Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Modern di Yogyakarta, Senat Mahasiswa Akademi Pimpinan Perusahaan/Komperindra, DPRGR Dati II Balikpapan, Resimen Pembangunan Mahasiswa Yogyakarta, Majelis Koperasi Batik Pekalongan, Gabungan Perusahaan Sejenis Farmasi, Direksi dan pegawai Bank Negara, ormas/buruh/karyawan PN Satya Niaga, Angkatan 45 Dati I Jawa Barat, Kubu Pancasila, dan lain sebagainya. Mereka menuntut pembubaran dan pelarangan PKI beserta ormas-ormasnya.<sup>130</sup>

Salah satu ormas yang juga disebut terlibat dengan PKI dan G30S adalah Lekra. Brigjen Ryacudu yang menjabat Pangdahan/Pepelrada Kalimantan Barat mengeluarkan surat keputusan pada tanggal 19 Oktober 1965 yang berisi nama ormas-ormas tersebut.

---

<sup>129</sup> Gloria Truly Estrelika..hlm. 34

<sup>130</sup> Ibid..35

Isinya mencantumkan bahwa yang dimaksud dengan ormas-ormas PKI antara lain, pemuda Rakyat (PR), Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI), Barisan Tani Indonesia (BTI), Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (Perhimi), Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI), Lembaga kebudayaan Rakyat (Lekra), Himpunan Sarjana Indonesia (HIS), Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), dan Barisan Nelayan Indonesia (BNI).<sup>131</sup>

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Arudji Kartawinata, Pimpinan DPRGR, bahwa dilakukan pembekuan kegiatan PKI dan ormas-ormasnya. Keterlibatan Lekra dengan PKI semakin dipertajam dengan adanya larangan terhadap beberapa seniman yang tergabung dalam Lekra. Tidak hanya itu, mahasiswa yang dianggap terlibat dalam G30S juga diberhentikan dari universitasnya. Mereka yang menerima ikatan dinas atau beasiswa juga dihentikan segala uang tunjangannya. Berita Yudha pada tanggal 2 Januari 1966 menuliskan bahwa G30S/PKI beserta ormas-ormasnya telah ketahuan telah menyusun rancangan penjagalan massal. Dokumen rancangan penjagalan tersebut

---

<sup>131</sup> Ibid..37

diketemukan oleh ABRI di Jatinegara, Jakarta. Penjagalan itu dilakukan terhadap mereka yang dianggap menentang PKI.<sup>132</sup>

Gestapu harus dilenyapkan dari bumi Indonesia. Begitu salah satu tajuk dalam artikel yang dimuat di Harian Angkatan Bersenjata. Berita-berita yang dimuat di harian itu pasca G30S memang tak jauh dari peristiwa tersebut. PKI sebagai dalang pun kerap disebut. Dari berita tersebut ada kesan bahwa peristiwa G30S sama kejinya dengan Gestapo, Nazi Jerman.

Dalam Thesis Gloria Trluly dipaparkan yakni Pada pertemuan buka puasa bersama di kediaman H. Djamaluddin Malik<sup>133</sup> di Jakarta, Wakil PM III Dr. Chairul Saleh menyatakan di hadapan para pimpinan NU bahwa vonis terhadap peristiwa Gestok/PKI sangat dinanti-nantikan. Chairul Saleh menambahkan bahwa ia berterima kasih kepada NU yang telah banyak memberikan bantuan. Menyikapi G30S, Mayjen Soeharto menegaskan bahwa masa kristalisasi belum selesai. Pernyataan ini membenarkan pernyataan Subandrio sebelumnya yang menyatakan bahwa tahun 1965 adalah tahun kristalisasi. Dr. Sumarno juga menyatakan hal serupa pada saat perayaan hari lahir NU ke-40.

---

<sup>132</sup> Ibid..37-38

<sup>133</sup> Pucuk Pimpinan Lesbumi I

Respon NU (Lesbumi) dan masyarakat atas pemberitaan tersebut dapat dilihat dari pernyataan NU di Angkatan Bersenjata tanggal 6 Oktober 1965.

“Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) beserta delapan ormas-ormasnya tanggal 5 Oktober kemarin telah mengeluarkan sejumlah pernyataan yang antara lain memohon kepada Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi agar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya membubarkan Partai Komunis Indonesia, Pemuda Rakyat, Gerwani, Serikat Buruh Pekerja Umum/SOBSI, serta semua ormas-ormas lainnya yang ikut mendalangi dan/atau bekerja sama dengan apa yang menamakan dirinya “Gerakan 30 September”. Selain itu, dimohonkan pula kepada Presiden/Pangti ABRI/Pemimpin Besar Revolusi agar mencabut izin terbit untuk selama-lamanya semua surat kabar/media publikasi lainnya yang langsung atau tidak langsung telah mendukung dan/atau membantu apa yang menamakan dirinya “Gerakan 30 September”.

Sikap NU terhadap Komunis adalah anti dari dahulu, meskipun pada waktu demokrasi dipimpin para tokoh tua dan kiai tetap setia kepada Presiden Soekarno. Namun sebagai politisi lainnya yang diberi jabatan-jabatan rendah selama Demokrasi Terpimpin menuntut agar

Komunis dilarang. Peranan yang sangat berpengaruh pada hari-hari itu dimainkan oleh Subhan ZE, yang bangkit sebagai salah seorang pengorganisir demonstrasi-demonstrasi mahasiswa yang mengakibatkan pembentukan "KAP-Getapu."<sup>134</sup>

Tidak ada kiprahnya PKI yang ditandingi oleh NU perlawanan NU terhadap PKI dilakukan disemua juang.<sup>135</sup> : PKI mebanggakan masanya : lewat Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat), sementara NU menandinginya : dengan Lesbumi (Lembaga Seniman Budajawan Muslimin Indonesia), PKI menggerakan : Gerwani, NU : menggerakan Muslimat. PKI menjadikan : Pemuda Rakyat selaku pasukan pelopor mereka, NU menjadikan : Gerakan Pemuda Ansor, PKI menggerakan : Barisan Tani Indonesia (BTI), NU : Menggaktifkan Pertanu, PKI : mempunyai SOBSI, NU menggerakan : Sarbumusi. PKI menyanyikan : Lagu Genjer-genjer, NU menciptakan : Solawat Badar, Sholawat untuk memuji-muji Rasulullah dan para Sahabat yang menyertai Nabi Besar Muhammad SAW.<sup>136</sup>

---

<sup>134</sup> Martin Van Bruinessen, *NU Tradisi, Relasi Kuasa, Wacana baru*, hlm 86. KAP-Gestapu Komando Aksi pengganyangan Gerakan September Tiga puluh.

<sup>135</sup> Kacung Marijan, *Quo Vadis NU, Setelah kembali ke Khittah 1926*, hlm. 91

<sup>136</sup> Sholawat ini adalah hasil karya Kiyai Ali Manshur, yang merupakan cucu Kiyai Haji Muhammad Shiddiq, Jember. Oleh itu, Kiyai 'Ali Manshur adalah anak saudara/keponakan Kiyai Haji Ahmad Qusyairi, ulama besar dan pengarang kitab ""Tanwir al-Hija" yang telah

Seperti dikemukakan sebelumnya, momen historis Lesbumi tidak bisa di lepaskan dari momen politik dan momen budaya sekaligus. Momen politik yang dimaksud disini adalah di keluarkannya manifesto politik pada tahun 1959 oleh presiden soekarno, pengarusutamaan Nasakom dalam tata kehidupan sosio-budaya dan politik Indonesia, serta perkembangan Lekra yang semakin menampakkan kedekatan hubungan dengan PKI. Pada saat yang bersamaan, momen historis Lesbumi juga tidak bisa dilepaskan dari momen budaya, yakni kebutuhan akan pendampingan terhadap kelompok-kelompok seni budaya di lingkungan NU dan modernisasi seni budaya.<sup>137</sup> Tidak bisa dibantah, kelahiran Lesbumi merupakan bagian dari pola umum reaksi Lekra-PKI. Ormas-ormas NU mereaksinya dengan menghadapi dengan resiko perkelahian, pemberontkan dan pembunuhan.<sup>138</sup>

Dalam bidang seni dan budaya Lesbumi menghimpun semua seniman dari para sastrawan, pelukis, peain film, komponis dan bidang-

---

disarankan oleh ulama terkemuka Haramain, Habib 'Alawi bin 'Abbas bin 'Abdul 'Aziz al-Maliki al-Hasani, dengan judul "Inarat ad-Duja" Diceritakan bahwa asal mula karya ini ditulis oleh Kiyai 'Ali Manshur sekitar tahun 1960an, pada waktu umat Islam Indonesia menghadapi fitnah Partai Komunis Indonesia (PKI), menyerukan agar Sholawat Badar dijadikan sarana bermunajat dalam menghadapi fitnah PKI

<sup>137</sup> Choerotun Chisan, Lesbumi Strategi Politik Kebudayaan, hlm. 133

<sup>138</sup> Chalid Mawardi, *Practica Politica Nahdlatul Ulama Mendajung Ditengah Gelombang*, (Djakarta : Jajayan Pendidikan Practica, 1979), hlm. 39



bidang seni lainnya. Titik perjuangan Lesbumi dalam merespon Lekra dalam bidang kesustraan adalah bersama seniman mencetuskan Manifes Kebudayaan. Kemudian dalam bidang penerbitan surat kabar Lesbumi Duta Masyarakat Asrul Sani, kemudian majalah Gelanggang pimpinan Asrul Sani.<sup>139</sup> Dalam bidang film ada pucuk pimpinan Lesbumi seperti, Djamaludin Malik, Usmar Islamil dan Asrul Sani, yang telah lantang menolak AMPAI tetapi sangat berbeda dengan Lekra yang menggunkan aksi sepihak aksi demo, boikot terhadap AMPAI dengan tujuan strategi PKI sebagai pahlawan Nasional no-Kolonialisme,<sup>140</sup>.

Tetapi Lesbumi menyikapi dengan sikap bermusyawarah lebih dahulu dan menggerakkan hati pemerintah untuk mengadakan pembatasan dalam bentuk kuota, negosiasi kepada pemerintah RI agar menetapkan kuota bagi film-film sudah dilakukan Lesbumi melalui Persari dengan Djamaludin Malik, yang dari semula 250 film per-tahun menjadi 120 per-tahun. Akan tetapi sayang pengurangan masuknya film-film

---

<sup>139</sup> Ajib Rosidi, *Masalah Angkatan dan Periodeisasi Sejarah Sastra Indonesia*, (Bandung, Pustaka Jaya Raya, 1970), hlm. 85

<sup>140</sup> PKI melakukan aksi teror melalui AMPAI itu adalah salah satu siasat persiapan perebutan kekuasaan/pemberontakan PKI melaksanakan apa yang mereka sebut “peningkatan situasi ofensif Revolusioner Tahun 1964-1965, lihat *Buku Gerakan 30 September PKI yang diterbitkan oleh Negara tahun 1994*.

Amerika ini tidak diimbangi oleh tindakan yang positif dalam bentuk memeprobanyak produksi film-film nasional.<sup>141</sup>

Sikap positif Lesbumi tegas dalam membatasi kekuasaan film-film Amerika di pasaran Indonesia. Usmar menggunakan istilah haram terhadap film yang dapat menimbulkan pengaruh negatif, baik dari Amerika atau dari yang lainnya.<sup>142</sup> Sikap Usmar yang nasionalis-religius membuatnya sering berhadapan dengan Lekra, dan menyatakan salah terhadap Lekra yang memakai politik adalah panglima, bagi umar bagi bangsa Indonesia berlaku prinsip, agama dan kebudayaan adalah induk dari politik, atau dengan lain perkataan politiklah yang harus dilahirkan dari pemikiran-pemikiran agama dan kebudayaan. Lesbumi membuat film yang disutradari Usmar Ismail Pada 30 Maret 1950, memproduksi film pertamanya yang berjudul Darah dan Doa. Dalam sejarah Sutradara film Indonesia, film tersebut tercatat sebagai Sutradara film Indonesia pertama yang keseluruhan penggarapan dan modalnya murni dari orang-orang pribumi dan diputar di istana kenegaran.<sup>143</sup>

---

<sup>141</sup> Choiratun Chisaan, *Lesbumi Strategi Politik Kebudayaan*, hlm. 179

<sup>142</sup> *Ibid.* Hlm. 179

<sup>143</sup> Tesis Sofian Purnama, *Usmar Ismail dan Tiga Fim Revolusi 1950-1954*, Jakarta: Universitas Indonesia Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, hlm. 71

Kemudian membuat film yang berjudul film Panggilan Tanah Suci, oleh Djamaludin Malik, Usmar Ismail dan Asrul Sani, yang bekerjasama dengan Departemen Agama RI, Departemen Penenrangan RI, persari Fim dan Sativa film. Tapi pada waktu pembuatan film ini di Indonesia telah terjadi suatu gerakan yang dipelopori oleh Lekra untuk melakukan penyingkiran terhadap orang-orang film. Alasan penyingkiran itu adalah soal film, bukanlah soal orang film semata-mata, melainkan soal rakyat.<sup>144</sup> Dalam bidang seni musik, PKI menciptakan lagu untuk memberi semangat untuk masanya, tetapi NU dengan tidak tinggal diam untuk merespon itu LESBUMI juga menciptakan untuk memberi semangat kepada GP Ansor, Muslimat, Pertanu dan ormas-ormas lainnya.

### **Lagu genjer-Genjer Versi PKI**

Jendral Jendral Nyang Jakarta pating keleler  
 Emake Gerwani, teko teko nyuliki jendral  
 Oleh sak truk, mungkir sedot sing toleh-toleh  
 Jendral Jendral saiki wes dicekeli  
 Jendral Jendral isuk-isuk pada disiksa  
 Dijejer ditaleni dan dipelosoro  
 Emake Gerwani, teko kabeh milu ngersoyo  
 Jendral Jendral maju terus dipateni

---

<sup>144</sup> Pembuatan film ini diserahkan semuanya kepada Lesbumi, dengan mengambil pembuatan di Baitullah Makkah. Karena ada gesekan PKI yang ingin menyingkirkan orang-orang film. FFAA. Choirutn Chisaan, hlm. 190

Lagu diatas ditandingi dengan shalawat Badar yang di ciptakan oleh Kyai Ali Mansur untuk mengobarkan semangat warga NU untuk melawan PKI

### **Shalawat Badar**

Shalaatullaah Salaamul laah  
 ‘Alaa Thaaha Rasuulillaah  
 Shalaatullaah Salaamullah  
 ‘Alaa Yaa Siin Habiiillaah  
 Tawassalnaa Bibismi llaah  
 Wabil Haadi Rasuulillaah  
 Wakulli Mujaahidin Lillaah  
 Bi Ahlil Badri Yaa Allaah  
 llaahi Sallimil Ummah Minal Aafaati Wanniqmah  
 Wamin Hammin Wamin Ghummah  
 Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

Kemudian Pemuda rakyatnya yang dimiliki PKI, dalam melakukan aksinya selalu juga menyanyikan lagu-lagu salah satunya lagu dibawah ini, namun oleh barisan serba guna NU (GP ANSOR) langsung direspon dengan menciptakan lagu tandingan untuk PKI.

### **LEKRA**

Bulat semangat tekat kita  
 Barisan sukarelawan Indonesia  
 Bedel dan sangkur siap bertempur  
 Tiap tantangan kita lawan pantang mundur  
     Hai..!!! awas imperialis durhaka  
     Pasukan rakyat kita kuat perkasa  
     Ini dadaku, mana dadamu  
     Kamu menyerang kita ganyang jadi abu

Reff : Ayolah kawan Buruh tani  
 Pemuda dan angkatan kita  
 Maju berlawan siap senjata  
 Dan cukupkan sandang pangan  
 Pastilah menang...pastilah menang...pastilah menang.  
 Pasti menang revolusi 45.

### LESBUMI

Gerakan pemuda Anzor Se-Indonesia  
 Dengan senjata agama  
 Siap sedia membela nusa dan bangsa  
 Di bawah bimbingan ulama  
     Gerakan pemuda Anzor siap berbakti  
     Kepada Ibu pertiwi  
     Biar sejuta bahaya kita hadapi  
     Tak kan gentar dalam hati

Reff : Pasti jaya Indonesia  
 Ku baktikan jiwa raga  
 GP Anzor Indonesia  
 Sedikit bicara banyak kerja

Itulah perjuangan NU khususnya Lesbumi dalam merespon PKI Lekra. Membuktikan bahwasanya polemik kebudayaan pada tahun-tahun 1965 sangat dipengaruhi sekali oleh politik sehingga seniman-seniman pada waktu itu tidak bisa menciptakan seni sebagai citra rasa jiwa apresiasi seseorang. Lesbumi mengungkapkan politik yang harus

dilahirkan dari pemikiran-pemikiran agama dan kebudayaan. “Dengan ilmu hidup ini akan lebih bermutu, dengan agama hidup ini akan lebih bermakna dan dengan seni hidup ini kan lebih syahdu”.<sup>145</sup>

Kehadiran Lesbumi di tengah-tengah perdebetan budaya karena memang merespon Lekra. Gestapu adalah masalah Nasional bukan masalah partai/ABRI tentunya semua elemen masyarakat mengecam pemberontakan ini. Apalagi NU yang selalu bersikap Anti kepada Komunis melakukan perlawanan demi perlawan dari semua bidang.

---

<sup>145</sup> Disampaikan oleh Prof. Dr. M Sholehuddin S.H, M.H pada workshop PAMMI Jatim, tanggal 30 Juni 2013 di Hotel Oval dengan judul makalah fenomena Pornografi di Indonesia,. Mengutip dari perkataan Prof Dr. H.A Mukti Ali (Menteri Agama RI)